

**PENGEMBANGAN NILAI MULTIKULTURAL
DALAM KURIKULUM 2013**

Supriyanto

(Dosen Pascasarjana IAIN Kendari)

Abstract

Curriculum 2013 has clearly adopted the integrated approach-monotheism seek to build harmony and rationality transcendental region within the national education based on the reality of diversity and pluralism. Learners are expected to be the pioneers of creating and opening the way education necessitates tolerance, openness, and integration of knowledge. Competence of learners are willing to accept, appreciate, and run their religion is the answer to the reality of the diversity of ethnic, cultural and religious. The presence of six characters who reflect the diversity and ethnic groups in Indonesia, ranging from figures derived from the ethnic Chinese to figures from Papua. The characters are present in textbooks namely Siti (girls veiled) and Lina (slanted eyes of ethnic Chinese) is a fact of value and message of multicultural education in the curriculum of 2013. On the other hand, multicultural attitude manifests in the form of mutual respect, mutual help, mutual empathy toward others is clearly illustrated in the picture / visual has always been accompanying course material.

Keywords: Value Multicultural, Curriculum 2013.

Pendahuluan

Islam memang sudah dianut sejak agama ini diturunkan di muka bumi dan terus menyebar ke seluruh negara di dunia. Namun tidak berarti diterimanya Islam secara luas oleh umat manusia, tidak berarti Islam yang dianggap sebagai agama “mapan” tanpa ada masalah dalam keberagamaan bagi pemeluknya. Fenomena munculnya klaim kebenaran (*truth claim*) mengenai pemahaman keislaman ahir-ahir ini cukup menggenjala di kalangan umat Islam itu sendiri.¹ Gejala ini tidak hanya menjangkit umat muslim secara individual namun juga secara komunal, lokal bahkan di tingkat global. Klaim merasa pemahamannya yang paling benar disertai sikap “menyalahkan” pemahaman orang atau kelompok lain, adalah menjadi warna dalam keberagamaan, khususnya umat Islam. diakui bahwa *truth claim* merupakan bentuk sikap kaku, tertutup dan ahistoris yang dipengaruhi oleh

¹Karl Raymund Popper, *Realism and the Aim of Science, from the Postscript to the Logic of Scientific Discovery*, ed. by W.W. Bartley, (New Jersey: Rowman and Littlefield, 1983), hlm. 53-54.

paradigma pemahaman yang dogmatis dan normatis. Padahal dalam filsafat ilmu Popper ditegaskan bahwa “pemahaman atau pemikiran” punya kemungkinan salah di samping kemungkinan benar, dan terbuka untuk dilakukan uji falsifikasi dan koroborasi kebenaran teoretis.²

Selain kuatnya dogmatisme dalam struktur pemahaman keislaman, umat muslim (baik dalam tataran global ataupun lokal, individual maupun komunal) masih cenderung dikotomis-separatisme. Ini tampak dari sikap yang masih membedakan dan bahkan memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Asumsinya, bahwa ilmu umum bukanlah suatu kebenaran yang datang dari Tuhan, atau sebaliknya: kajian tentang agama kerap dianggap tidak ilmiah oleh sains. Hal ini pun dikarenakan pola pikir “sentralisasi-otonom”, agama adalah sumber kebenaran yang berdiri sendiri, begitupun sebaliknya. Polarisasi inilah yang kemudian membentuk suatu paradigma dikotomis-separatisme terhadap keilmuan.

Bahkan dalam memahami keislaman masih cenderung menggunakan pola pikir parsial-atomistik. Dogmatisme sebagai basis pemahaman keislaman mengungkung struktur pemahaman yang hanya berpijak pada aspek doktrinal-normatif dan menganggapnya sebagai suatu kesempurnaan persepsi tentang Islam. Padahal sebagai ajaran (Islam dengan “T” besar) yang telah bersetubuh dengan entitas, tentunya ada aspek lain selain normativitas di dalamnya. Meminjam istilah Amin, suatu ajaran ketika telah bersetubuh dengan entitas ruang, waktu, manusia dan lainnya, secara otomatis ia memiliki aspek historisitas-profanasitas.³

Kuatnya dogmatisme dalam struktur pemahaman umat muslim menjadikan corak doktrinal-normatif sebagai pendekatan utama dalam kajian keislaman. Di satu sisi, corak ini memang diperlukan untuk memupuk aspek spiritualitas. Namun di lain sisi, pendekatan doktrinal-normatif terkadang mengesampingkan pendekatan historis, empiris, analisis-kritis

² Samsu Rizal Panggabean, “Islam dan Multikulturalisme: Ragam Manajemen Masyarakat Plural” dalam Zakiyuddin Baidhawidan M. Thoyibi (eds.), *Reinvensi Islam Multikultural* (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 15.

³ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 18 dan 92-94.

yang menjadikannya “bermasalah” ketika dihadapkan dengan realita kehidupan yang meniscayakan pluralisme atau pluralitas.⁴

Sebagaimana yang kerap ditegaskan bahwa ketika Islam telah bersetubuh dengan entitas tentu tidak hanya mengandung unsur normativitas saja, melainkan juga beberapa unsur lainnya yang bersifat historis. Muhammad sebagai pengemban misi risalah “Islam” adalah bagian dari masyarakat Arab. Tentunya penerjemahan dan pbumian “Islam” oleh Muhammad di tanah Arab tidak lepas dari unsur-unsur kearaban sebagai bingkai konteks yang melingkupinya. Islam mengandung unsur normatif-doktrinal dan unsur historis-kultural. Keduanya tidak dapat dipisahkan, namun bisa dibedakan. Bagaimanapun, melalui “penerjemahan” unsur-unsur historis-kultural itulah, umat muslim non-Arab dapat menemukan esensi Islam yang bersifat normatif-doktrinal. Upaya yang dilakukan Muhammad saja tidak lepas dari kungkungan konteks historis, apa lagi pemahaman keislaman yang dilakukan oleh generasi setelahnya. Oleh karena itu, sangat kurang tepat jika kajian keislaman hanya mengacu pada pendekatan normatif-doktrinal saja.

Studi tentang Pluralisme dan Multikulturalisme

Sebagai realitas sosial, pluralisme agama merupakan diferensiasi masyarakat yang dapat diamati pada level individu sebagai diferensiasi peran. Pada level pengorganisasian, pluralisme agama merupakan kompetisi organisasi-organisasi formal, dan pada level kemasyarakatan ia dianggap sebagai pembatasan-pembatasan terhadap fungsi institusi.⁵ Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme, tetapi pluralisme agama harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, serta suatu keharusan bagi tersemainya prinsip keselamatan umat manusia. Ikatan-ikatan keadaban yang dimaksud adalah sebagai nilai-nilai universal yang harus diperjuangkan oleh setiap umat beragama dalam rangka mencari titik temu antar-agama dalam membentuk masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab hanya

⁴Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 18 dan 92-94.

⁵Talcott Parsons, *The Social System (The Major Exposition of the Author's Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System)* (New York: The Free Press Paperback, 1964), hlm. 126.

bisa dibangun melalui keterbukaan, saling membantu, saling toleransi, bekerja sama dalam memperjuangkan keadilan, dan saling menghormati sisi kemanusiaan manusia secara bersama-sama.⁶

Namun, perlu diakui bahwa pemeliharaan keragaman dan otonomi agama-agama itu memberi kesan bahwa agama-agama memang tidak bisa dikompromikan, sehingga hal itu justru akan menciderai makna dan visi pluralisme agama itu sendiri, karena dengan otonomisasi agama-agama justru akan melahirkan kelompok-kelompok yang eksklusif. Pada bidang sosiologi-psikologi, Knitter menjelaskan bahwa setiap umat Kristen perlu memiliki jati diri pribadi melalui kewarganegaraan dunia. Pendekatan ini diterapkan Knitter dalam kehidupan beragama agar menghasilkan suatu jati diri agama yang universal. Artinya sekalipun ia adalah milik sebuah tradisi agama, tetapi ia tidak terikat pada bentuknya yang kaku.

Untuk mewujudkan pluralisme agama sebagaimana yang tertuang di atas, kiranya perlu kita telusuri pluralisme agama dalam konsep Paul F. Knitter. Ia, Knitter, mengajak kita untuk membangun pluralisme agama berbasis kultur dengan jargon *unitife pluralism*. Artinya, dalam memandang sebuah perbedaan terutama pluralitas pemikiran keagamaan harus dilihat dari sudut pandang yang baru, yakni memahami pluralisme agama bukan sekadar pengetahuan tentang sistem-sistem atau gagasan-gagasan agama yang lain, tetapi juga pengetahuan tentang pribadi-pribadi penganut agama itu secara kompleks, sehingga kita bisa saling belajar dari bahasa, pengalaman, dan kehidupan mereka sehari-hari.⁷ Titik awal yang menjadi dasar gagasan Knitter adalah berangkat dari pemikiran bidang filsafat, sosial-psikologi, dan politik-ekonomi.⁸

Alwi Shihab menyatakan bahwa pluralisme bukan semata-mata sebuah pengertian yang merujuk pada kenyataan tentang kemajemukan, namun bagaimana juga terlibat aktif dalam kemajemukan tersebut. Partisipasi tersebut ditujukan melalui sikap interaksi positif dalam lingkungan yang majemuk, tidak mengklaim dan memonopoli kebenaran, serta bersikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Menurut Shihab, pluralisme agama mengandung unsur-unsur, antara lain: *pertama*, pluralisme menuntut keterlibatan

⁶Madjid, *Islam Doktrin*, hlm.42.

⁷Paul F. Knitter, "Toward a Liberation Theology of Religions" dalam John Hick (ed.), *Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religions* (New York: Orbis Books, 1987), hlm. 125.

⁸Paul F. Knitter, *Introduction Theologies of Religions* (New York: Orbis Book, 2002), hlm. 54.

aktif terhadap adanya kemajemukan. *Kedua*, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme yang hanya merujuk adanya keanekaragaman agama, ras, dan bangsa yang hidup berdampingan di suatu lokasi tanpa interaksi positif di antara mereka. *Ketiga*, pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme.

Pluralisme agama di sini seharusnya dibedakan dengan pemahaman inklusivisme. Apabila inklusivisme meniscayakan pemahaman terhadap agama lain dari dimensi kesamaan substansi dan nilai, maka pluralisme justru mengakui dan hendak membangun pemahaman mengenai agama-agama itu sendiri. Tidak sedikit masyarakat awam yang salah mengerti dalam memaknai pluralisme sebagai paham yang memandang semua agama sama, atau hanya agamanya yang paling benar, sehingga secara apriori mereka menegaskan pluralisme. Padahal pluralisme adalah menjunjung tinggi adanya perbedaan dalam masyarakat yang multikultural. Itulah konteks kelahiran pluralisme.

Munculnya pluralisme merupakan reaksi dan penolakan sebagian masyarakat terhadap konsep tentang “alam” dan “doktrin logis” yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar jika memenuhi kriteria kebenaran logis. Dalam kaca pandang pluralisme, kriteria kebenaran tidak hanya berdasarkan logika, tetapi terdapat banyak kriteria kebenaran lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, pluralisme di Inggris semakin populer, karena gerakan perlawanannya terhadap kapitalisme. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pluralisme dianggap dapat menjawab permasalahan tersebut, karena dengan pluralisme, masalah-masalah konflik antar-agama memiliki banyak alternatif penyelesaian.⁹

Berangkat dari konteks tersebut, pluralisme merupakan suatu pandangan yang meyakini ragam kehidupan, termasuk realitas keberagamaan manusia. Akan tetapi dalam kenyataannya, diversitas dan pluralitas keagamaan merupakan arena yang berpotensi konflik, kecuali jika orang yang berbeda keimanan di dalamnya memiliki kesadaran koeksistentif dan kooperatif. Jika semua agama dipandang sama-sama mengajarkan kebenaran, maka mendorong timbulnya sikap saling menghormati dan saling belajar perlu diaktualisir, karena pada dasarnya setiap pemeluk agama cenderung untuk bertahan dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Dari kesadaran terhadap pluralitas inilah akan lahir sikap

⁹ Muhyar Fanani, “Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat” dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* (Salatiga: P3M STAIN Salatiga, 2003), hlm. 19. 24.

saling memahami (*cross understanding*) keyakinan masing-masing dan pada gilirannya moralitas akan segera terwujud. Untuk itu, pluralisme agama di Indonesia dapat terwujud bila tiap penganut agama tidak hanya dapat membuka diri, belajar, dan menghormati mitra dialognya, tetapi juga harus *committed* terhadap agamanya sendiri. Hanya dengan sikap demikianlah dapat menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan konsep “Bhinneka Tunggal Ika.”

Istilah multikulturalisme dan pluralisme memang sering dipertukarkan, sekalipun keduanya memiliki keunikan masing-masing. Multikulturalisme adalah sikap dan paham yang menerima adanya berbagai kelompok manusia yang memiliki struktur dan kultur yang berbeda. Sedangkan pluralisme lebih merujuk pada kesediaan untuk menerima dan terbuka pada etnis dan budaya lain, karena etnis dan budaya lain itu bisa bernilai baik untuk warganya. Makna pluralisme agama tersebut nampaknya didasari tesis Emile Durkheim yang menyatakan bahwa, agama adalah sebuah realitas sosial, ia merupakan suatu ekspresi dari kesadaran kolektif (*moral community*).

Multikultural adalah sebuah realitas, di mana masyarakat yang majemuk atau beragam dalam kesukubangsaan. Mereka dapat saling menerima dan menghargai keanekaragaman. Misalnya, perbedaan dalam hal budaya, nilai-nilai budaya, pendapat atau ide dan apa saja yang terkait dengan keberagaman fisik, sebagai suatu realitas yang ada. Dengan konsep ini, multikulturalisme selayaknya digunakan sebagai ideologi untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kondisi seperti itulah yang akhirnya membawa keberadaan pluralisme mendapatkan tempat yang layak.¹⁰

Multikultural adalah sebuah realitas di mana masyarakat yang majemuk atau beragam dalam kesukubangsaan atau etnisitas (*ethnicity*), mereka saling menerima dan menghargai keanekaragaman yang sudah tentu mengandung di dalamnya perbedaan. Misalnya, perbedaan dalam hal budaya, nilai-nilai budaya, pendapat atau ide dan apa saja yang terkait dengan keberagaman fisik, sebagai suatu realitas yang ada. Dengan konsep ini, multikulturalisme selayaknya digunakan sebagai ideologi untuk menata kehidupan

¹⁰ Parsudi Suparlan, *Pengertian Budaya, Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengkajian Masalah-masalah Agama* (Jakarta: Depag RI, 1982), hlm. 123.

berbangsa dan bernegara. Karena kondisi seperti itulah yang akhirnya membawa keberadaan pluralisme mendapatkan tempat yang layak.

Kerukunan dan toleransi antarumat beragama merupakan ciri khas dari potensi integrasi yang terdapat pada kehidupan keagamaan pada masyarakat multikultural. Dalam hal ini, Clifford Geertz, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong bertumbuhnya kerukunan antarumat beragama yang antara lain: *pertama*, cinta rasa kebudayaan yang sama, yang meliputi tumbuhnya rasa nasionalisme yang tinggi, yang menekankan apa yang oleh semua orang telah memiliki dari pada menekankan perbedaan-perbedaan; *kedua*, adanya fakta bahwa pola-pola keagamaan tidak muncul dalam bentuk-bentuk kesalehan tertentu, sehingga komitmen keagamaan dan komitmen-komitmen lainnya dapat saling mengimbangi dan melengkapi; *ketiga*, toleransi umum yang didasari relativisme kontekstual yang melihat nilai-nilai tertentu itu sesuai dengan suatu konteks sehingga ia dapat meminimalisir gerakan misionarisme; dan *keempat*, tumbuhnya mekanisme sosial yang siap menghadapi bentuk-bentuk integrasi sosial yang sinkretik dan pluralistik, di mana orang yang memiliki pandangan dan nilai orang lain dapat juga menjaga ketertiban masyarakat.¹¹

Menurut Irwan Abdullah, bahwa untuk menjaga kerukunan antarumat beragama agar tetap terjalin integrasi bangsa adalah: *pertama*, mengembalikan kepercayaan publik, bukan saja kepercayaan pemerintah, tetapi juga pada *stakeholder* dan pusat-pusat kekuasaan. Pengembalian ini harus dilakukan dengan membangun sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan sistem hukum yang adil; *kedua*, mengembangkan kapital sosial yang dapat berfungsi sebagai pengikat perbedaan-perbedaan dan memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan identitas lokal; dan *ketiga*, pembentukan masyarakat sipil yang selain merupakan strategi untuk memberikan pendidikan tentang wawasan multikulturalisme bagi masyarakat beragama, juga membangun iklim yang kondusif bagi terwujudnya tradisi hidup beragama yang memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan-perbedaan baik intra maupun antarumat beragama.¹²

¹¹ 34 Clifford Geertz, "Religion as a Cultural System" dalam R. Banton, *Antropological Approach to the Study of Religions* (Canada: Basic Book Inc, 1965), hlm. 127.

¹² 35 Irwan Abdullah, "Kondisi Sosial dan Bayangan Disintegrasi Tanpa Ujung" dalam *Indonesia Abad XXI: Di Tengah Kepungan Perubahan Global* (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 4.

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa (*ethnic group*) atau kebudayaan suku bangsa (*ethnic culture*) yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Kalau konsep dan prinsip kemajemukan lebih menekankan pada keanekaragaman yang ada dalam realitas masyarakat, kemajemukan adalah sesuatu yang dapat dilihat dan diterima secara kasat mata, sesuatu yang fisik, realitas fisik (*physical reality*).

Menangkap Spirit Multikultural dalam Pendidikan Agama

Secara maknawiyah, pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman masyarakat.¹³ Azra, mendefinisikan pendidikan multikulturalisme adalah sebagai pendidikan untuk atau keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan.¹⁴ Kritik Freire semakin menguatkan asumsi tersebut karena dia mengatakan bahwa pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang menjauhi realitas sosial dan budaya, pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang bukan hanya mengagungkan situasi sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran.¹⁵

Ainurrofiq Dawam, melihat pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman etnis, agama (aliran kepercayaan) dan budaya.¹⁶ Banks dan Banks yang dikutip Azra juga mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai kajian dan disiplin yang muncul yang tujuan utamanya menciptakan kesempatan pendidikan yang setara bagi siswa tentang

¹³ DedeRosyada, “PendidikanMultikulturalMelaluiPendidikan Agama Islam”, Dalam*DidaktikaIslamika*; JurnalPendidikan, KelIslamandanKebudayaan, volVI,Nomor 1, Januari 2005, hlm. 22-22.

¹⁴ Azyumardi Azra, “Pendidikan Multikultural:Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika” dalam *Tsaqofah*, Vol. Nomor 2 tahun 2003, hlm, 21.

¹⁵ Muhaimin el-Ma’hady, “mutikulturalisme dan pendidikan Multikultural” dalam dalam artikelnya tanggal 27 Mei 20014, hlm. 3.

¹⁶ AinurrofiqDawam, *EmohSekolahMenolakKomersialisasiPendidikandanKanibalismeIntelektualMenujuPendidikanMultikultural*, Jogyakarta: InspealAhimsakarya Press, 2003, hlm. 100.

ras, etnik, kelas sosial dan kelompok budaya yang berbeda.¹⁷ Berdasarkan definisi-definisi di atas, semuanya nampak mengarah pada tujuan yang sama yaitu bagaimana lewat pendidikan mampu mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil dan makmur dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama dan budaya. Semangatnya adalah bagaimana membangun kekuatan di seluruh sektor sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri yang tinggi dan di hargai bangsa lain. Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberika peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa memperbedakan perlakuan karena perbedaan etnik, agama, budaya dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional.

Selain itu pendidikan multikultural dapat pula dimaknai sebagai sebuah proses pembangunan seluruh potensi manusia serta menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekwensi keragaman budaya, etnis, dan aliran agama. Dengan demikian pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan manusia setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun latar belakang budayanya. Seiring dengan hal di atas, bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹⁸

Sebagai pengajar dan praktisi pendidikan agama, penulis mencoba untuk merefleksikan tulisan ini dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Namun penyelenggaraan pendidikan agama secara umum terpampanglah sebuah sistem yang rumit yang melibatkan berbagai institusi, materi pengajaran, metologi pengajaran, serta manajerialnya, yang kurang lebih semuanya mempunyai karakteristik tersendiri berikut implikasinya. Menurut

¹⁷ Azyumardi Azra, “Dari Pendidikan Kewargaan Hingga Pendidikan Multikultural Pengalaman Indonesia,” dalam *Edukasi: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 2. Nomor 4 tahun 2004, hlm, 19-20.

¹⁸ Lihat *Undang-undang Republic Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003, hlm. 5.

Amin Abdullah, pendidikan agama di era kontemporer masih banyak diwarnai asumsi dasar paradigma klasik skolastik para konseptor dan perancang PAI yang terlalu menggaris bawahi keyakinan dan anggapan, bahwa “keselamatan kelompok” amat tergantung pada “keselamatan individual”, dengan lain ungkapan, keselamatan individual bagaimanapun juga jauh lebih pokok dan utama dari pada keselamatan sosial. Pendidikan agama, termasuk PAI di dalamnya, pada saat ini masih terfokus pada urusan untuk kalangan sendiri (*individual affairs* atau *private affair*) dan kurang peduli pada isu-isu umum dalam bentuk Al-Akwal Al-Amanah (*public morality* atau *public affair*).”¹⁹

Paradigma PAI yang eksklusif-doktrinal ini telah menciptakan kesadaran peserta didik untuk memandang agama lain secara berbeda, bahkan bermusuhan, penyampaian PAI kebanyakan juga terlalu menekankan doktrin keselamatan yang didasarkan pada kebaikan hubungan antara diri dengan Tuhan, dan kurang begitu memberikan tekanan antar sesama individu. Padahal di era multikulturalisme ini PAI. Mestinya melakukan re-orientasi filosofis paradigmatis tentang bagaimana memunculkan kesadaran peserta didik agar wajah inklusif dan toleran.

Mata pelajaran PAI diarahkan untuk menghasilkan manusia yang terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan perubahan, berorientasi demokratis dan mampu memiliki keyakinan yang tidak selalu sama dengan pendapat orang lain, berpijak pada keyakinan, menghargai waktu, konsisten dan sistematis dan menyelesaikan masalah, meyakini dan menghargai pendapat orang lain, rasional dan percaya pada kemampuan iptek, menjunjung tinggi keadilan berdasarkan prestasi, kontribusi dan kebutuhan, serta berorientasi kepada produktivitas, efektifitas, dan efisiensi.²⁰

PAI dengan pendekatan multikulturali merupakan satu upaya untuk mengurai berbagai iklim buruk selama ini dialamatkan pada pendidikan agama, selain upaya-upaya seperti integrasi pendidikan agama dengan Iptek, demokratisasi dalam pendidikan agama, dan sebagainya. Pendidikan agama dalam perspektif multikulturalisme memiliki makna “

¹⁹M.Amin Abdullah, “Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemejemukan Sebuah Tindakan Materi dan Metode Pendidikan Agama” dalam *Taswir Afkar*, Jurnal Refleksi Pemikiran, Keagamaan dan Kebudayaan Menuju Pendidikan Islam Pluralis”. Edisi XI tahun 2001, hlm. 14-15.

²⁰Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. II. hlm. 47.

penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan agama yang mempertimbangkan segala bentuk keberagaman dan perbedaan klultur, baik secara vetikal maupun horozontal. Hal ini mengingatkan pola pemahaman agama yang “kesedinian” “Kekinian” dalam memahami dan melaksanakan ajarannya. Dengan demikian menipis tuduhan Islamisasi perundang-undangan pendidikan nasional, atau pemihakan pemerintah terhadap kamu muslimin. Upaya ini semata-mata memberikan *public service* pendidikan sesuai dengan hak-hak peserta didik, tanpa membedakan agama apapun.²¹

Untuk itu, perlu diketahui muatan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pendidikan agama. Menurut Farida Hanum, nilai multikultural dalam pendidikan agama mencakup tema besar seperti demokratis, humanisme, pluralisme.²² Implementasi nilai tersebut dalam konteks pendidikan multikultural, seperti menanamkan nilai tentang cara hidup menghormati, tulus, toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Kemudian masih dalam Farida Hanum, bahwasiswa nantinya diharapkan menjadi generasi yang menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari.²³

Nilai-nilai multikultural yang dapat diimplementasikan di sekolah antara lain: nilai inklusif (terbuka), nilai mendahulukan dialog (aktif), nilai kemanusiaan (humanis), nilai toleransi, nilai tolong-menolong, nilai demokrasi (keadilan), nilai persamaan dan persaudaraan, nilai berbaik sangka, nilai cinta tanah air.

Nilai inklusif memandang bahwa kebenaran yang dianut oleh suatu kelompok, dianut juga oleh kelompok lain. Nilai ini mengakui terhadap pluralisme dalam suatu komunitas atau kelompok sosial, menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusifitas yang bermuara pada tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang ada. Nilai mendahulukan dialog mengenai pemahaman yang berbeda tentang suatu hal yang dimiliki masing-masing kelompok yang berbeda dapat saling diperdalam tanpa merugikan masing-

²¹Indra Jati Sidi, "Pendidikan Agama di Sekolah Umum Dalam Perspektif Multikultura", Dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan*, Volume 2 Nomor 4 tahun 2012, hlm. 27.

²²Farida Hanum dan Setya Raharja, *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Multikultural Menggunakan Modul Sebagai Suplemen Pelajaran IPS di Sekolah Dasar*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Volume 04, Nomor 2, 2011, hlm. 15..

²³*Ibid.*, hlm. 116.

masing pihak. Hasil dari mendahulukan dialog adalah hubungan erat, sikap saling memahami, menghargai, percaya, dan tolong menolong.²⁴

Nilai kemanusiaan pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia itu sendiri. Keragaman itu bisa berupa ideologi, agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Demikian halnya nilai toleransi hidup bermasyarakat, dipahami sebagai perwujudan mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kebebasan berkeyakinan dalam arti tidak adanya paksaan dalam hal agama, kebebasan berpikir atau berpendapat, kebebasan berkumpul, dan lain sebagainya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tak bisa hidup sendirian meski segalanya ia miliki. Harta benda berlimpah sehingga setiap saat apa yang ia mau dengan mudah dapat terpenuhi, tetapi ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain dan kebahagiaan pun mungkin tak akan pernah ia rasakan. Hal inilah yang tergambar dalam nilai tolong menolong antar sesama manusia. Nilai demikian perlu dibarengi dengan sikap menjunjung persamaan dan persaudaraan yang dikenal dengan istilah *ukhuwah*. Ada tiga jenis *ukhuwah* dalam kehidupan manusia, yaitu: *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa), *ukhuwah bashariyah* (persaudaraan sesama manusia). Dari konsep *ukhuwah* itu, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia baik yang berbeda suku, agama, bangsa, dan keyakinan adalah saudara. Karena antarmanusia adalah saudara, setiap manusia memiliki hak yang sama.

Berbaik sangka juga merupakan perwujudan pendidikan multikultural di sekolah. Memandang seseorang atau kelompok lain dengan melihat pada sisi positifnya dan dengan paradigma itu maka tidak akan ada antar satu kelompok dengan kelompok lain akan saling menyalahkan. Sehingga kerukunan dan kedamaian pun akan tercipta. Untuk itulah semangat kurikulum 2013 membangun harmoni kehidupan dengan mengembangkan nilai multikultural.

Pengembangan Nilai Multikultural Kurikulum 2013

Sejak pertama negara Indonesia terbentuk hingga, masyarakatnya sudah mejemuk terdiri atas berbagai etnis, budaya, suku, ras, dan agama. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural dan letak geografis yang begitu beragam dan luas. Jika tidak

²⁴Farida Hanum dan Setya Raharja, *Pengembangan...*, hlm. 116.

dibarengi oleh sikap toleransi, keberagaman tersebut justru berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik vertikal maupun konflik horizontal. Konflik demikian di Indonesia sering kali terjadi. Disintegrasi bangsa sempat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kesatuan Republik Indonesia. Sikap saling menghormati dan toleransi harus ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia melalui dunia pendidikan. Seperti termaktub dalam Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 4 ayat 1 No. 20 tahun 2003 bahwa, pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.²⁵

Pendidikan yang sesuai dengan UU tersebut adalah pendidikan multikultural. Untuk menghindari konflik seperti kasus yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, sudah saatnya dicarikan solusi preventif yang tepat dan efektif. Salah satunya adalah melalui pendidikan multikultural. Dalam struktur kurikulum 2013, mata pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki waktu pembelajaran yang cukup banyak tepatnya empat jam pelajaran dalam satu minggu.²⁶ Penambahan durasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dimaksud seolah-olah semakin memberi harapan dalam pembentukan karakter diri siswa yang dapat memahami keragaman etnik, budaya dan keragaman religius. Justru karena keragaman inilah yang menginspirasi pemerintah untuk menentukan langkah-langkah pengembangan wawasan pendidikan multikultural. Penanaman pendidikan multikultural melalui kurikulum 2013 merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mentransformasi pendidikan nasional. Langkah tersebut diambil dengan harapan dapat membentuk generasi muda Indonesia yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Penanaman

²⁵Lihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 4 ayat 1, berbunyi bahwa “bahwa, pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Menurut catatan penulis, dalam sejarah pendidikan di Indonesia baru pada kurikulum 2013 yang mencantumkan secara tekstual nilai multicultural pada mata pelajaran terutama di jenjang Sekolah Dasar.

²⁶Sepanjang Indonesia merdeka, Kurikulum Pendidikan Nasional telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali, Kurikulum tahun 1947 rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai, tahun 1964 rencana pendidikan sekolah dasar, tahun 1968, kurikulum sekolah dasar, tahun 1973, kurikulum proyek perintis sekolah pengembangan (PPSP), kurikulum 1975 kurikulum Sekolah Dasar, tahun 1984, kurikulum 1984, tahun 1997 revisi kurikulum 1994, tahun 2004, rintisn kurikulum berbasis kompetensi, tahun 2006, KTSP dan tahun 2013, kurikulum 2013 yang berkarakter.

pendidikan multikultural tercermin dalam berbagai buku teks yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.

Dalam buku teks menawarkan banyak tokoh baru dengan latar belakang yang bervariasi. Dimana terdapat enam tokoh yang mencerminkan keragaman dan etnis di Indonesia, mulai dari tokoh yang berasal dari etnis Tionghoa hingga tokoh yang berasal dari Papua. Tokoh-tokoh yang hadir dalam buku teks yakni Siti (anak perempuan berjilbab) dan Lina (bermata sipit dari etnis Tionghoa). Ada juga Edo yang berambut keriting dari Papua, Benny berasal dari etnis Batak, atau Udin dari Betawi. Selain itu, untuk tiap mata pelajaran agama juga ditambah dengan budi pekerti. Selain memperkuat karakter tiap siswa, juga dibangun kemampuan siswa untuk memegang prinsip toleransi dalam kehidupan bersama.

Hadirnya berbagai tokoh tersebut dapat mencerminkan keragaman agama dan etnis yang ada di Indonesia. Sehingga, peserta didik di Indonesia akan terbiasa hidup dalam keragaman, yang dibangun sejak dini di bangku Sekolah Dasar. Selain memperkuat aspek kesadaran terkait pengetahuan multikultural melalui sisipan tokoh-tokoh tersebut, budi pekerti juga disisipkan pada pelajaran Pendidikan Agama. Hal ini ditujukan untuk membentuk siswa yang tidak hanya terbiasa hidup dengan keragaman tetapi juga memegang prinsip toleransi dalam kehidupan bersama. Relevan dengan hal tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muh. Nuh bahwa kurikulum 2013 disain untuk memperkuat identitas keindonesiaan sebagai negara yang plural.²⁷

Persoalan selanjutnya, apakah mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum 2013, dimensi pendidikan multikultural dianggap cukup terang untuk mengantarkan peserta didik memiliki wawasan multikultural? Dan bagaimana implementasinya dalam mengajarkan wawasan multikultural? Persoalan nilai multikultural dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam pada Kurikulum 2013 tidak sekedar tersirat, namun juga tersurat. Aspek yang tersurat maupun yang tersirat inilah yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini.

Demikian halnya mengenai strategi implementasi tentu banyak argumen strategi yang dipilih oleh *stakeholder* pendidikan, namun hemat penulis setidaknya ada tiga strategi, yaitu: 1) memahami berbagai kultur melalui literatur yang ada, 2) melibatkan guru-peserta didik dalam

²⁷Harian Kompas, *Kurikulum 2013 Memperkuat Keindonesiaan*, Jakarta: 12 Desember 2013.

berbagai iven lintas kultur, 3) mengunjungi lokasi atau tempat masyarakat pemilik budaya yang beragam, 4) bersosialisasi dengan masyarakat pemilik budaya yang beragam. Dengan langkah-langkah tersebut setidaknya peserta didik akan memperoleh pemahaman keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia. Di samping itu melalui langkah-langkah tersebut peserta didik akan dapat mengembangkan wawasannya mengenai pendidikan multikultural. Dengan demikian para peserta didik akan memiliki keluasan wawasan mengenai pendidikan multikultural, dan sekaligus menjadi pelaku pendidikan multikultural yang efektif.

Paradigma PAI dalam kurikulum 2013 meminimalisir kesan eksklusif-doktrinal yang mendorong peserta didik untuk memandang agama lain secara inklusif. Dengan pendekatan tematik dalam kurikulum 2013, seolah-olah materi PAI tidak berdiritetapi bersinergi atau berintegrasi dengan materi pelajaran lainnya. Hal ini dapat melahirkan pandangan keagamaan bahwa doktrin keselamatan tidak hanya didasarkan pada kebaikan hubungan antara diri dengan Tuhan.²⁸ Mata pelajaran PAI dalam kurikulum 2013 digeser paradigmanya agar menghasilkan manusia yang terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan perubahan, berorientasi demokratis dan mampu memiliki keyakinan yang tidak selalu sama dengan pendapat orang lain, berpijak pada keyakinan, menghargai waktu, konsisten dan sistematis dan menyelesaikan masalah, meyakini dan menghargai pendapat orang lain, rasional dan percaya pada kemampuan iptek, menjunjung tinggi keadilan berdasarkan prestasi, kontribusi dan kebutuhan, serta berorientasi kepada produktivitas, efektifitas, dan efisiensi.²⁹

Sikap toleransi dan tolong menolong sebagai perwujudan nilai multikultural juga dapat dilihat secara jelas dari visual materi PAI dengan tema “Masih Sayang”.³⁰ Di sana divisualkan seorang anak menolong temannya yang sedang jatuh dari sepeda. Digambarkan pula seorang anak sedang menjenguk temannya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan masih banyak lagi visual lain yang syarat dengan nilai karakter positif. Muatan

²⁸M.Amin Abdullah, “Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemejemukan Sebuah Tijakan Materi dan Metode Pendidikan Agama” dalam Taswir Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran, Keagamaan dan Kebudayaan Menuju Pendidikan Islam Pluralis”. Edisi XI tahun 2001,hal.14-15.

²⁹Mastuhu, *Memberdayakan system Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wancana Ilmu, 1999) cet.II. Hal47

³⁰ Lihat gambar/visual pada “buku siswa” matapelajaran PAI, halaman 2-3. Visual tersebut mengisyaratkan sikap tolong menolong, toleransi antar sesama dan saling menumbuhkan rasa empati terhadap sesama manusia.

multikulturali yang ada pada materi PAI dalam kurikulum 2013 ini merupakan satu upaya untuk mengurai berbagai iklim buruk selama ini dialamatkan pada pendidikan agama, selain upaya-upaya seperti integrasi pendidikan agama dengan Iptek, demokratisasi dalam pendidikan agama, dan sebagainya. Pendidikan agama dalam kurikulum 2013 berparadigma multikulturalisme yang memiliki makna “penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan agama yang mempertimbangkan segala bentuk keberagaman dan perbedaan klultur, baik secara vertikal maupun horozontal”. Hal ini mengingatkan pola pemahaman agama yang “kesedinian” “kekinian” dalam memahami dan melaksanakan ajarannya.³¹

Dalam implementasinya, pendidikan multikultural mata pelajaran PAI pada kurikulum 2013 bukan semata membina *knowledge skill* pada siswa. Program pendidikan ini tidak diarahkan untuk tenaga ahli dalam pendidikan agama, tetapi mendidik siswa untuk jadi warga negara yang religius dan berwawasan ke-Indonesia-an. Karena itu, orientasi pembelajarannya adalah pembinaan sikap dan perilaku hidup siswa yang tidak hanya akan tercapai dengan desain kurikulum yang komprehensif, tapi juga pendekatan metode dan tehnik pembelajaran yang relevan untuk membentuk sikap ideal tersebut.³²

Muatan nilai multikultural dalam Kurikulum 2013 mempertegas harapan yang menyeimbangkan antara *hardskill* dan *softskill*. Tepatlah kiranya jika dikatakan Kurikulum 2013 lebih dikenal sebagai kurikulum karakter (*character curriculum*), karena dalam proses pembelajaran dan metode yang digunakan sampai pada semua perangkat pembelajaran mengandung nilai-nilai sikap moral spiritual dan karakter karena kompetensi sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan secara harmonis dan terpadu..³³ Titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah pendidikan dikembangkan secara terpadu melalui pilar-pilar fitrah manusia yang dibungkus dengan ruh ajaran ilahiyah. Kompetensi yang dituju bukan berdimensi tunggal-parsial, tetapi multi dimensi secara integral, baik ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik peserta didik. Artinya, pendidikan terpadu yang

³¹ Indra jati Sidi, “Pendidikan Agama di Sekolah Umum Dalam Perspektif Multikultura”, Dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan*, Vol2 Nomor 42004, hal 27

³² Rosyada Dede, *Paradigma Pendidikan Demoikratis, sebuah model pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta Prenada Media, 2004) hal, 163-170

³³ 22 *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003*, 2. 23 Forum Manguwijaya VII, *Menyambut Kurikulum 2013*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013), x. 24

dikembangkan bukan sekedar proses pendidikan searah, tetapi proses pendidikan multidimensi untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Nilai karakter dalam Kurikulum 2013 dapat dilihat dalam kompetensi inti. Melalui kompetensi ini, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan/spiritual (KI 1), sikap sosial (KI 2), pengetahuan (KI 3), dan penerapan pengetahuan (KI 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. KI-1 dan KI-2 dalam Kurikulum 2013 menegaskan bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik haruslah diwarnai dan ditopang oleh spiritualitas yang bersumber dari nilai-nilai agama. Artinya peserta didik belajar bukan hanya untuk kepentingan mata pelajaran yang ditekuninya tetapi menjadi sarana membentuk karakter kepribadian yang religius dan berwawasan ke-Indonesia-an.

Kesimpulan

Secara konseptual, Kurikulum 2013 membangun harmoni wilayah transendental dan rasionalitas dalam wilayah pendidikan nasional yang berdasarkan pada keragaman dan realitas kemajemukan, konsep ini dapat dikatakan menggunakan pendekatan *integrated-tauhid*. Peserta didik ditempatkan sebagai pionir bagi terciptanya suasana toleransi, keterbukaan, dan integrasi pengetahuan. Kompetensi peserta didik yang mau menerima, menghargai, menerima pluralisme, dan menjalankan agama yang dianutnya (KI-1) menjadi kompetensi inti dalam Kurikulum 2013.

Nilai multikultural dalam Kurikulum 2013 tersebut akan teraktualkan jika implementasinya dilakukan beberapa langkah berikut; 1) pemahaman keberagaman peserta didik tidak lagi hanya ditekankan pada pengetahuan dan kesadaran syariah semata, tetapi harus menekankan pada pemahaman dan penghayatan; 2) pelatihan, nilai ajaran agama pendidik dan peserta didik harus dilatih agar menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan; 3) pembiasaan, setelah memiliki pemahaman dan keterampilan adalah pembiasaan; 4) sikap dan perbuatan muncul

dari pemahaman terhadap nilai, ajaran, dan norma yang yang dibiasakan; 5) pembelajaran yang kondusif, karena mensyaratkan adanya *education climate* yang bagus, sehingga memperbaiki kualitas kerja tenaga pendidik dan kependidikan dan mendorong peserta didik untuk memperjuangkan perolehan prestasi dan membentuk perubahan perilaku.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M.Amin, "Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemejemukan Sebuah Tjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama" dalam *Taswir Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran, Keagamaan dan Kebudayaan Menuju Pendidikan Islam Pluralis*. Edisi XI tahun 2001.
- Abdullah, Irwan, "Kondisi Sosial dan Bayangan Disintegrasi Tanpa Ujung" dalam *Indonesia Abad XXI: Di Tengah Kepungan Perubahan Global* (Jakarta: Kompas, 2000).
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman, *Wadatul Wujud, Membedah Dunia Kamal*, Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2013.
- Ahmadi, *Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2013.
- Al-Attas, S.M. Naquib, *The Consept OF Education In Islam*, ISTAC: Kualalumpur, ISTAC, 1991.
- Azra, Azyumardi, "Dari Pendidikan Kewargaan Hingga pendidikan Multikultural Pengalaman Indonesia," dalam *Edukasi: Jurnal pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol, 2. Nomor4 tahun 2004.
- Azra, Azyumardi Azra, "Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika'dalam *Tsaqofah*, Vol. Nomor 2 tahun 2003, hlm, 21.
- Burdah, Ibnu, *Pendidikan Karakter Islami*, Jakarta: Erlangga, 2013. Hadi, Samsul, *Islam Spiritual, Cetak Biru Keserasian Eksistensi*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Ackermann, John Robert, *Agama sebagai Kritik: Analisis Eksistensi Agama-agama Besar*(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991).
- Geertz, Clifford, "Religion as a Cultural System"" dalam R. Banton, *Antropological Approach to the Study of Religions* (Canada: Basic Book Inc, 1965).
- Hanum, Farida, *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Multikultural Menggunakan Modul Sebagai Suplemen Pelajaran IPS di Sekolah Dasar*.Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Volume 04, Nomor 2, 2011.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1999)
- Kniter, Paul F., "Toward a Liberation Theology of Religions" dalam John Hick (ed.), *Myth of Christian Uniqueness: Toword a Pluralistic Theology of Religions* (New York: Orbis Books, 1987)
- , Paul F. *Introduction Theologies of Religions* (New York: Orbis Book, 2002)
- Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Majid, Abdul, Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012. Mahfudz, Chirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Masduki, Irwan, *Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2011).
- Mastuhu, *Memberdayakan system Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. II.
- Mulyasa, E., *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muzamiroh, Mida Latifatul, *Kupas Tuntas Kurikulum 2013*, Jakarta: Kata Pena, 2013)
- Mangunwijaya, *Menyambut Kurikulum 2013*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.
- Megawangi, Ratna, *Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa*, Jakarta: IHF dan BP Migas, 2004.
- Rahardjo, M. Dawam, "Fanatisme dan Toleransi," dalam Irwan Masduqi, *Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Mizan Pustaka, 2011).
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis, sebuah model pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta Prenada Media, 2004)
- Sidi, Indra Jati, "Pendidikan Agama di Sekolah Umum Dalam Perspektif Multikultura", Dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan*, "Vol 2 Nomor 4 2004.
- Suparlan, Parsudi, *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengkajian Masalah-masalah Agama* (Jakarta: Depag RI, 1982).
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992. Sudarminta, *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, 1997.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1997).
- Schuon, Frithjof, *Islam and the Perennial Philosophy*, London: World of Islam Festival Publishing Company, Ltd, 1976.
- Sukidi, *Pendidikan Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: Grasindo: 2002.
- Taufiq, Pasiak, *Revolusi IQ, EQ, SQ Antara Neurosains- dan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2004. Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2007.
- Tobroni, *Pendidikan Islam, Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas*, Malang: UMM Press, 2008), 150. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2007.
- Wahid, Abdurrahman, "Islam, Ideologi, dan Etos Kerja di Indonesia," dalam Budhy Munawar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- , Abdurrahman, "Aspek Religius Agama-agama di Indonesia dan Pembangunan" dalam M. Masyhur Amin (ed.), *Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-agama di Indonesia* (Yogyakarta: LKPSM, 1994).
- Widiasto, Tonny D., *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.
- Zaini, Muhammad, *Membumikan Tauhid, Konsep dan Implementasi Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011.